



# SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

JL. PROF SOEDARTO, KEC. TEMBALANG, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50275

CONTACT PERSON : LONITA AINI YUMNA (085293497416)

EMAIL : SENATMAHASISWA.FHUNDIP@GMAIL.COM | LINE : @WMV9874F | WEBSITE : SM.FH.UNDIP.AC.ID

## NOTULENSI RDP PERMA ANGGARAN DAN PENGAWASAN

Senin, 19 Juni 2023 Pukul 12.00 - 17.00 WIB

Via Offline, Kofe Tembalang

**BEM** : udah ada beberapa indikator dan kriteria yang sudah dibuat. Disini ada keilmuan ormawa, disini ruang lingkup nasional itu mendapatkan poin seratus dan ada kkm yaitu 55. Pada dasarnya indikator yang dibuat itu berkaitan dengan pelaksanaan proker juga. Taraf ekotif itu biasanya dalam regional, undip, dan fh, jadi untuk taraf nasional itu akan susah untuk dipenuhi. Di bidang ekotif juga ada pelatihan, jenis proker itu diharapkan lebih dikelompokkan lagi. Ingin bertanya juga, kenapa yang lebih dari 3 hari itu dapat 100?

**PANJA**: yang pertama menindaklanjuti bahwa proker mengumpulkan pengusaha apakah itu pake dekanat atau tidak. Jadi sebenarnya adalah yang dimaksudkan adalah proker yang didanai oleh dekanat yang kemudian dikumpulkan dan diklasifikasi a mengenai proker yang didanai. Kenapa pelaksanaan tiga hari Karena dilihat dari rapat rata lama hari yang ada di rab jadi semuanya disesuaikan dengan yang ada di rab jadi tidak asal asalan.

**BEM** : pengelompokkan ekotif ini sebaiknya dikelompokkan lagi dan pelaksanaannya jangan 3 hari karena cukup sulit dan bagaimana kapan pelaksanaannya

**PANJA**: ini memang tujuan kita bisa disahkan pada periode ini dengan target pada Agustus. Tapi kami memilih tidak diterapkan di tahun ini karena sangat sulit untuk menghitungnya baik dari senat maupun ormawa. Jadi kapanpun disahkan maka akan dilaksanakan tahun depan.

**BEM** : mengenai saran, sebenarnya kegiatannya tahun depan. Disini sudah banyak proker yang dilaksanakan dan dikonversikan pada tabel penilaian. Untuk kesesuaian proker, kenapa hanya mendapat 75?

**PANJA**: jadi sebetulnya mengapa cuma 75 bukan 100 tentang aspek penilaian dari kesesuaian hanya ia atau tidak jadi nilainya hanya 75

**BEM** : saran dari aku, **kalau memang sesuai mending dikasih 100 aja**, disini juga banyak aspek penilaian yang kecil. Hal ini sebenarnya kembali ke subjektivitas pengawas. Jadi mending dikasih 100 aja. Untuk inovasi, untuk kegiatannya itu dijalankan berdasarkan inovasi dari tahun sebelumnya. Kalau suatu bidang konsisten menjalankan program kerja dari tahun ke tahun, kenapa hanya mendapat 50? kenapa yang mendapat 100 hanya untuk proker baru?

**PANJA**: sebetulnya kenapa kami mendesain demikian karena dengan kondisi yang disusun sedemikian jadi kami menuntut adanya pembaharuan baik substansi maupun output. Karena berkaitan dengan output yang diharapkan untuk bermanfaat bagi masyarakat dan mahasiswa apapun pembaharuan itu maupun ini asli baik target peserta, konsep acara dll. Tapi harus diingatkan apakah dengan konsep yang diberikan apakah memberatkan atau tidak apakah setuju atau tidak

**BEM** : kalau menurutku, ini agak memberatkan karena gak semua bidang itu mampu berinovasi tentang program kerja karena suatu program kerja juga mempertimbangkan output dan juga pandangan dekanat.

**PANJA**: mungkin inovasi di proker baru atau proker lama ada inovasi bisa dipindahkan ke seratus jika seperti itu.

**BEM** : program kerja lama yang tidak ada inovasinya itu apakah hanya 75 saja? nanti tanyakan kepada teman teman yang lain karena gak semuanya itu mampu membuat program kerja baru, ada bidang yang proker nya itu itu aja





# SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

JL. PROF SOEDARTO, KEC. TEMBALANG, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50275

CONTACT PERSON : LONITA AINI YUMNA (085293497416)

EMAIL : SENATMAHASISWA.FHUNDIP@GMAIL.COM | LINE : @WMV9874F | WEBSITE : SM.FH.UNDIP.AC.ID

**PANJA:** itu hanya 75 aja. Tapi mungkin akan dihitung kembali apakah worth it untuk di 100 maupun 75

**BEM** : keaktifan peserta dimana bisa mendapat poin secara utuh itu cukup sulit, sedangkan dalam suatu proker biasanya sesi tanya jawab hanya membuka 2 termin. Apa tidak terlalu tinggi?

**PANJA:** sebetulnya ini menjadi pemikiran kita sehingga kita menentukan 15 persen dan bisa dapat berubah apakah tinggi atau rendah. Jadi kita bertanya apakah terlalu tinggi atau bagaimana. Atau tidak ada aspek keaktifan atau tidak

**BEM** : **temen temen bisa tetep menilai, tapi saran untuk targetnya itu dikurangi saja karena dari subjektifitas pengawas itu juga bisa dilihat apakah acaranya berjalan aktif atau tidak**

**BEM** : rapat kerja ini diadakan sebelum supd untuk nentuin dana dari dekanat? penilaian dari dekanat itu mengacu pada yang dibuat di dim? penilaian itu kan buanya diawal ya, jika ada indikator yang berbeda itu bagaimana?

**PANJA:** ya sebelum supd. Untuk nentuin dapat dari dana dekanat. Jadi berkaca dari proposal rkat yang dia dapat 1-2 tahun lalu. Jadi terkait dengan akar itu akan melihat dari bahwa dari aspek sudah penuh atau tidak. Contoh suatu proker target nya 100 orang dan tapi kita punya data pengawasan hanya ada a50 orang maka kita kana menanyakan dulu mau revisi target peserta atau yakin denga jumlah per serta yang ditawarkan. kalo mau revisi salahkan kalo enggak ya salahkan. Jika tidak tercapai dalam proses pelaksanaan proker maka apa adanya dalam mengasa karena kita sudah bertanya mua diturunkan atau tidak.

**BEM** : tadi, kalau misalkan dibawah kkm proker nya gak cair ya, bem ini kan sebenarnya kalo adain proker itu untuk menjadi wadah bagi mahasiswa. Kalau ditolak karena tidak sesuai KKM apakah itu gak menyalahi tupoksi dari bem sendiri karena dia sebagai wadah, walau pesertanya tidak sesuai target tapi tupoksi bem memang begitu. kalau kasusnya begitu, bagaimana?

**PANJA:** proker ditolak tidak dapat diajukan saat raker. Yang pertama adalah sedari awal kita juga harus lihat apa urgensi sebuah proyek dapat dana dekanat atau tidak jadi mereka mampu memberi kebermanfaatan. Apabila dua indikator tersebut tidak dipenuhi maka sulit kita terima Karen output sudah tidak tercapai. Kemudian jumlah dana yang terbatas oleh dekanat karena banyak juga proker yang butuh didanai. Karena sangat disayangkan jika terjadi hal hal seperti itu. Kalau tidak disetujui bukan berarti tidak bisa dilaksanakan tapi bisa dilaksanakan hanya saja tidak didanai. Contohnya adalah fun week gathering karena hanya khusus internal. Karena terlihat tidak etis karena ada beberapa ormawa juga yang memang sangat butuh dana untuk proker yang hanya saja harus mengalah untuk kegiatan bondong tersebut

**BEM** : di bagian pengabdian masyarakat, mau minta penjelasan mengenai ruang lingkup adanya indikator nasional. Dari dimas sendiri jarang ada proker yang lingkupnya nasional, dua tahun yang lalu pun begitu. Mungkin ada penjelasan kenapa mencantumkan nasional untuk ruang lingkup dimas?

**PANJA:** sebetulnya proses yang mengenai nasional itu tentang ada atau tidak merupakan apabila kita memberikan ruang kebebasan berinovasi bagi bem untuk, melakukan proker. Apabila tidak ada maka hanya mentok 75. Kemudian setelah kita hitung maka berada di nilai 75. Lalu untuk kkm kita menghitung 5 - 10 dari nilai terkecil jadi kita tidak membuat kkm yang n begitu tinggi





# SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

JL. PROF SOEDARTO, KEC. TEMBALANG, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50275

CONTACT PERSON : LONITA AINI YUMNA (085293497416)

EMAIL : SENATMAHASISWA.FHUNDIP@GMAIL.COM | LINE : @WMV9874F | WEBSITE : SM.FH.UNDIP.AC.ID

**BEM** : terkiat dengan target peserta dari dimas, kalau dilihat target pesertanya itu ada penilaian 25 untuk peserta 10 orangan. **Penilaian ini terlalu besar untuk dimas, karena untuk mencapai 50 itu susah. Penilaian ini cukup memberatkan dimas.**

**PANJA:** oke nanti kami catat tentang keberatan. Karena kita melihat dari proposal rkat itu. Kebetulan target peserta Dimas itu tidak dicantumkan berapa target maka yang tidak dicantumkan maka kami sama ratakan. Sehingga kami tanyakan apakah keberatan atau tidak

**BEM** : terkait aspek penilaian pengawasan juga, kalau yang dijelaskan tadi itu ada penjelasan maksimal pengoreksian proposal itu 4 kali, dan bem itu sering lebih. proposal itu sering berubah karena ada pengunduran pelaksanaan. Di penjelasan tadi penilaian itu berdasarkan proposal dan lppk, menurutku pribadi mending meniadakan karena jika terjadi pengunduran maka akan masuk ke kuadran selanjutnya.

**PANJA:** mungkin akan dijelaskan yang pertama adalah yakni diluar dari 4 waktu tersebut masih dimungkinkan revisi proposal dengan indikator tertentu contoh mekanisme anggaran dari dekanat sehingga apabila terjadi perubahan mekanisme anggaran di waktu diputar peri isian maka dimungkinkan. Yang kedua terkait dengan masalah waktu itu kan sebetulnya ditetapkan di popok sal rkat karena berupa angan angan terapi terkait dengan hal demikian hari pelaksanaan sebagai proposal dengan lppk. Apakah ada hal hal seperti itu tidak masalah perbedaan antara proposal rkat dengan rkat. Apabila ada pergantian tanggal maka dapat dimanfaatkan di perintisan di waktu tertentu. Jadi kami tidak masalah mengenai masalah waktu

**BEM** : berarti perubahan kecil itu harus direvisi?

**PANJA:** masih tidak terlalu urgen dilakukan asalkan pelaksanaannya tidak terlampau jauh sesali dari proposal rkat. Kalo udah hingga berbulan bulan maka akan dilakukan revisi di bulan bulan tertentu

**BEM** : saram untuk hal ini koordinasikan kepada komisi terkait dan badan anggaran kalau misalkan gapapa nggak kena revisi.

**BEM** : di bidang halmas, untuk ruang lingkup ada nasional, regional, dll. Contoh audnas, disini kami ingin menanyakan sebenarnya ruang lingkup itu untuk apa? tujuannya atau bagaimana

**PANJA:** kalo misalkan untuk audnas juga ingin dipertanyakan. Karena tujuannya untuk siapa. Berarti tujuannya adalah mahasiswa ya. Kalo misalkan di proposal dkat mengenai advokasi nya mana akan dimasukan ke nasional tapi kalo misal dirasa sulit maka ak akan di rundingkan kembali.

**BEM** : kalau tujuannya untuk mahasiswa fh berarti ruang lingkupnya fh ya?

**PANJA:** ya

**BEM** : terkait dengan target peserta company visit kapro, tahun ini berkolaborasi dengan audnas. Targetnya adalah fh, walau kita pergi ke jakarta dan melakukan visitasi. ruang lingkupnya tetap nasional atau fakultas hukum?

**PANJA:** untuk sebetulnya visitasi itu yang diukur artinya melebihi regional maka bisa masuk nasional karena yang dilihat adalah visitasinya.

**BEM** : target peserta pada company visit tahun ini itu 25 orang, berarti kita ,mendapat poin 25?

**PANJA:** mungkin saran dari kami bahwa target pesertanya dapat nilai 100. Nanti akan kita rundingkan kembali





# SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

JL. PROF SOEDARTO, KEC. TEMBALANG, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50275

CONTACT PERSON : LONITA AINI YUMNA (085293497416)

EMAIL : SENATMAHASISWA.FHUNDIP@GMAIL.COM | LINE : @WMV9874F | WEBSITE : SM.FH.UNDIP.AC.ID

**BEM** : perma ini untuk tahun depan, berarti terkait lpjat dan lpjtt itu berlaku tahun depan?

**PANJA**: nanti akan kami tanyakan diakhir apakah supd dan raker bisa digunakan mekanisme diawal tahun 2024 atau 2025 karena yang menjadi pelaksanaan raker dan supd yaitu penyerapan dana pada tahun lalu

**BEM** : misal, ini berlaku di tahun depan, lebih baik memang diterapkan di tahun depan karena peraturan ini belum tersebar luas secara baik

**PANJA**: emang untuk lpt at dan tt tidak kana dilaksanakan tahun ini maka kami pikirkan untuk tahun depan untuk supd juga bukan sekarang masih tahun depan

**BEM** : kalau tadi membahas soal dimas, kalau kalian liat prokernya dimas itu masuk ke dalam kriteria proker baru. Semisal cuma ganti nama doang apakah itu masih dibilang proker baru? untuk proker dimas ini masih agak susah untuk mewujudkan proker baru, tapi pelaksanaan kita udah banyak. Tahun ini dimas hanya dapat sedikit, kalau ini diterapkan takutnya dimas makin dikit. Terkait ada proker yang berdana rkat pembicara, kalau pembicara tidak mau dibayar maka akan mendapat nilai menguntungkan. Kalau misalkan banyak kejadian demikian, lantas kemana dana dana pembicara terserap?

**PANJA**: sebetulnya sebagai tambahan informasi tentang proker baru ada pandangan yautu apakah proker baru ini apakah baru muncul atau proker yang baru tidak ada dana dekanat dan menggunakan dana dekanat. Oleh sebab itu kami cenderung ke poin kedua. Untuk proker baru itu salah satu bentuk kompensasi itu di poin 100 proker baru atau proker lama ada inovais dan 75 proker lama tanpa inovasi. Tapi kita tetep melihat dalam emnacantumakn kkm kuat melihat poin terendah dan dikurang 5-10 poin. Itulah kami menetapkan masalah inovasi itu 50 untuk kemudian kkm dikurangi 10 agar dapat tetap bisa lolos. Untuk bagian anggaran itu apabila gak serpa 100 perdana karena kami sudah memberikan kesempatan 4 kali. Misal di proker a dana yang dialokasikan 1 juta tapi diserap 800 karena gak amau dibayar maka 200 ribu bisa dialokasikan untuk proker lain di tanggal tanggal yang telah ditentukan

**BEM** : sebenarnya untuk dana rkat, operasional dan pembicara itu dipisah atau enggak?

**PANJA**: untuk tahun ini penggunaannya untuk rkat atau operasional hanya beda di ruang lingkup saja apakah gede atau kecil. Penggunaanya sama.

**BEM** : kalau dari bem udah cukup dan tidak bisa dialihkan untuk proker selanjutnya, itu bagaimana?

**PANJA**: kalo misal tidak bisa dilaksanakan maka bisa dialihksn beli barang di kegiatan tersebut mungkin bisa dialihkan ke hal lain di hal tersebut atau dialokasikan ke proker lain

**BEM** : berarti pada intinya penyerapannya harus 100 persen ya? kalau misalkan udah cukup dan tidak bisa dialihkan kemana mana, lantas bagaimana?

**PANJA**: ya kami harapkan 100 persen . Sepanjang kutahu apabila ada dana yang tidak terserpa maka pihak dekanat akan mengalihkan. Sehingga apabila tidak ada yang terserpa ke permasalahan eksternal akan kami permasalahan ke proker lain dan apabila sampai akhir tidak bisa maka itu adalah konsekuensi jadi kamu selalu sosialisasi bahwa uang harus habis. Untuk operasioansl dana nya berbeda tiap ormawa.

**BEM** : misalkan dana pembicara dialihkan ke operasional, itu kalau dana operasionalnya 10 juta, kalau ada pengalihan makan dana operasional jadi 1,2 juta?

**PANJA**: untuk tahun ini memang operasional 10 juta tapi penggunaan bebas tapi untuk akun akunya sama aja.

**BEM** : apakah bisa lebih dari 10 juta dana operasioansl?

**PANJA**: tetap 10 juta





# SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

JL. PROF SOEDARTO, KEC. TEMBALANG, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50275

CONTACT PERSON : LONITA AINI YUMNA (085293497416)

EMAIL : SENATMAHASISWA.FHUNDIP@GMAIL.COM | LINE : @WMV9874F | WEBSITE : SM.FH.UNDIP.AC.ID

**BEM** : soal dengan kesesuaian nilai itu berlakunya tahun depan ya?

**BEM** : mau tanya soal kkm perbidang, itu kan beda beda ya. perhitungannya dari mana?

**PANJA**: untuk kkm itu beda karena dilihat dari nilai yang paling rendah dan dikurangi 5-10 poin

**BEM** : untuk pengadaan barang itu tahun ini bisa atau enggak ya?

**PANJA**: sebenarnya masih belum jelas mengenai pengadaan barang karena sangat cepat sekali

**BEM** : kemaren pas baca kebirokrasian itu tercantum nota cap lunas, setahu kita itu cap toko. Ada perubahan baru atau gimana?

**PANJA**: untuk tahun ini ada perubahan bisa cap lunas dan cap toko untuk senat tapi kalo keuangan itu berbeda ya

**BEM** : kalau boleh saran, kalau dari kalian aman tapi keuangan gak aman, dampaknya kan bakal kena ke ukm nah itu **mending disamain aja antara cap toko dan cap lunas.**

**PANJA**: nanti akan kami tampung sarannya

**BEM** : berbicara mengenai kesesuaian proker dengan bidang, pertama yang ingin ditanyakan itu darimana kawan senat bisa melihat kesesuaian proker dengan bidang yang menyelenggarakan? lalu, kenapa aspek kesesuaian hanya 75, kenapa tidak 100 kan sudah sesuai, ada baiknya diberikan poin sempurna.

**PANJA**: izin ngejelakan srbetulnya kita lihat dsri output yang adaditprtoposalrkatt mengrnai apakah proker sesuai atau tidak. Untuk 75 dan 25 kami melihat aspek ini hanya iya atau tidak jadi bukan suatu hal yang besar impact apabila iya. Tetapi juga tadi udh disampaikan sehingga itu merupakan hal yang ingin diubah

**BEM** : arahan strategis itu berkaitan dengan GDE yang dibawa oleh pemimpin. Proker yang dilaksanakan oleh bidang bem itu secara tidak langsung itu merupakan arahan dari ketua bem dan wakil bem. Lantas bagaimana bisa pihak eksternal menilai bahwa proker itu sesuai atau tidak? sedangkan bem itu membuat proker pasti sudah ada pertimbangan sesuai atau tidak.

**PANJA**: terimakasih atas nilai nilainya. Yang pertama mengensi oengkalsigikasian lolos atau tidak ada di forum raker dan raker itu dilakukan dengan emkanisme musyawarah bukan srta merta bilai lalu selesai jadi apabila ada perbedaan pendapat maka ada pembuktian apakah sesuai dengan bidang atau tidak lalu kemudian akan dilakukan kudyarah demi mufakat atau juga sebaliknya apabila ada proses pembuktian tidak mampu berarti juga akan berarti tidak sesuai.

**BEM** : berarti aku mengambil kesimpulan, tentang kesesuaian program kerja itu didiskusikan di rapat kerja ya?

**PANJA**: betul.

**BEM** : ada pertanyaan tentang jenis proker, misalnya bergerak di ranah pergerakan sosial, kenapa konferensi dapat 100, seminar 75, dan softskill 50? sedangkan semua ini berkaitan dengan softskill. Lalu kenapa jenis proker yang lain itu mendapat 25, kalau dapat segitu lebih baik kita tidak melaksanakan proker tersebut.

**PANJA**: oke yang pertama sdlaahb ikan terkait dengan hal tersebut. Poin tersebut disesuaikan dnegan proker yang di lakukan baik tajun ini atau tahun lalu jadi kita bisa tau jenis proker yang dilakukan BEM. Lalu kenapa dibagi bagi tiap poin karena kami mencoba untuk menilai beberapa proker yang dilakukan apakah skala besar atau targe tpesert abesar maka kami akan masukkan nilai yang lebih sempurna. Jika tidak maka kami tau dinilai lebih





# SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

JL. PROF SOEDARTO, KEC. TEMBALANG, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50275

CONTACT PERSON : LONITA AINI YUMNA (085293497416)

EMAIL : SENATMAHASISWA.FHUNDIP@GMAIL.COM | LINE : @WMV9874F | WEBSITE : SM.FH.UNDIP.AC.ID

kecil kalo kesesuaian itu merupakan interpretasi dari kita sendiri itulah mengapa kemudian kita ingin bertanya khusus hal ini sedai awal kita ingin menyusun sesuai perspektif kita jika ada yang kurang relevan maka akan kami tampung. Untuk proker baru itu aoaakh kita akan masukkan ke niali tinggi atau rendah. Sebetulnya ini belum pasti karena tidak masuk kedalam pertama hanya pada sk sebelum pelaksanaan raket. Apabila kemudian jenis proker relevan maka kemudian masuk ke poin 100 / 75/ 50. Sehingga antisipasinya adalah kamu nasukkan ke poin 25

**BEM** : dikhawatirkan, walau tidak berdampak untuk bem tahun ini, tapi takut bem tahun depan keberatan. ini sangat disayangkan dika proker baru mendapat nilai kecil, sedangkan bem itu dinamis. masih disayangkan kenapa penilaian masih berfokus pada pelaksanaan proker. menurutku hal itu tidak perlu dipermasalahkan karena semua itu tergantung pada output yang berpengaruh untuk pesertanya.

**PANJA:** izin masuk bahwa indikator itu hanya untuk raker tandanya di awal tetapi kamu sudah antisipasi dengan adanya inovasi. Jadi ada penilaian kualitatif juga yang digunakan.

**BEM** : tentang keaktifan peserta, itu ada survei tentang objek pengawasan. Keberjalanannya bagaimana dan penilaiannya bagaimana?

**PANJA** : untuk survei terkait penolakan itu di komisi ahli dan ketua wskil. Ksrena permasalahannya ini adalah survei yang tidak ingin disebarluaskan. Tapi kenapa kita tidak mau lanjutkan karena gak semua mau isi bahkan ada panitianya. Jadi ketika kita buat sampling maka gaada rumuaan yang tepat walaupun itu ide yang bagus jadi kita juga riset mengaji hal ini. . Sebnnya form itu berkaitn dengan proker ormawa sehingga ada perlunya untuk kepastian ormawa. Sehingga oenilaian kualitatif punya subjektifitas yang tinggi tergantung siapa yang ngawas atau sebaliknya. Nah artinya subjektifitas ada hal yang niscaya tapi yang jadi fokus kami untuk meredamnya dengan memberikan aspek penilaian yang bisa diimplementasikan di waktu kedepannya

**BEM** : Kualitatif itu adalah subjektif yang ada dasar ilmiahnya karena ada rumusan-rumusan, yang dikhawatirkan itu dinamika mahasiswa sekarang itu malu untuk bertanya. Bagaimana jika tidak ada yang bertanya?

**PANJA:** yang pertama bahwa mungkin nilai yang disini ketinggian. Kemudian bahwa kita lihat penilaian kualitatif jadi aspek salah satu aja. Jadi apabila dalam kondisi masyarakat malu bertanya tapi masih ada berbagai penilaian yang ada sehingga penilaian kualitatif bukan suatu benda karena masih ada aspek yang lain yang bisa dikejar jadi itu yang membuat kami merasa dia satu sisi bisa mengukur output yang g dikejar atau pun meredam proker

**BEM** : bertanya tentang lama pelaksanaan, tapi tadi sudah disampaikan. Lama pelaksanaan itu tidak menguntungkan juga, karena kenapa harus berlama-lama melaksanakan proker. Di bem itu banyak proker yang berkelanjutan, seperti dimas, jadi bisa jadi pertimbangan untuk lama pelaksanaannya

**PANJA:** berkaitan dengan output bahwa emang betul sebenarnya bisa dikatakan proker ini output yang diberikan. Sebenarnya kali menyusun proker itu katakanlah seminar, output yang diharapkan apa dan bagaimana menentukannya kalau tepat sasaran

**BEM** : Dalam setiap perencanaan dalam bem memiliki tolak ukur dalam penyampaianya diman bidang hsp untuk mencapai sutu yang dicapai terharapkan yang dimana agar masyarakat mengetahui kenyataan pada masyarakat terkait suatu isu tertentu. dapat mengetahui dan memahami substansi terkait suatu isu dimana menjadi suatu kekhawatiran jika sekarang para mahasiswa turun isu namun tidak mengetahui terkait isunya.





# SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

JL. PROF SOEDARTO, KEC. TEMBALANG, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50275

CONTACT PERSON : LONITA AINI YUMNA (085293497416)

EMAIL : SENATMAHASISWA.FHUNDIP@GMAIL.COM | LINE : @WMV9874F | WEBSITE : SM.FH.UNDIP.AC.ID

**PANJA:** yang pada akhirnya output itu sudah tercantum dalam penilaian kualitatif bagian kesesuaian tujuan dalam hal ini kesesuaian tujuan bisa dilihat dari peserta atau panitia. Disini pengawas hadir dan perhatikan bagaimana interaksi peserta dan sebagainya sehingga menimbulkan keyakinan apakah sesuai atau tidak cuma tetep dipertimbangkan kembali apakah apakah lebih baik seperti ini atau tidak

**BEM :** kalau misalkan menurut teman teman senat disini poinnya sudah terwakilkan maka aku sudah percaya pada setiap pengawas yang hadir dimana para pengawas harus paham terhadap keberjalanan acara tsb dan harus paham akan konteks tsb. dimana akan menjadi pr bagi senat sekarang yang harus menyiapkan terkait senat untuk tahun depan.

**PANJA:** menurut BEM bagaimana mengaji jenis proker baru karena tentu kita tidak bisa menebak "*jenis proker yang akan ada di kemudian hari*" kira penulisan klausanya akan diberi ke forum atau harus masuk ke nilai paling bagus atau bagaimana

**BEM :** bertanya mengenai nomenklatur **menurutku sebagai sudut pandang eksekutif ketika suatu organisasi mengadakan proker yang insidental, untuk diberikan poin yang maksimal** karena dari ukmf atau organisasi lainnya proker itu kebanyakan dijalankan bertahun-tahun. Lebih baik diberikan poin maksimal. Untuk proker itu mengajukannya pada saat raker ya?

**BEM :** penasaran aja, jika sudah dilaksanakan setelah supd apakah timelinenya akan berubah?

**PANJA:** ya sebetulnya dari kami SUPD dilaksanakan akan sama di Februari akhir dan kita akan melaksanakan raker lebih cepat sehingga tidak akan merubah timeline SUPD

**BEM :** rentangnya mepet sama pelantikan, kalau ada kepengurusan yang belum terbentuk sepenuhnya. SUPD gimana?

**PANJA:** sebetulnya ada beberapa ukm yang belum terbentuk kepengurusannya sehingga ini menjadi kewajiban bagi senat untuk sosialisasi kepengurusan tahun ini lalu kemudian akan sosialisasi kepada kepengurusan baru. Jadi nanti di awal tahun akan ada sosialisasi lagi bahkan untuk sosialisasi perma paling sedikit 3 kali awal, akhir, dan pertengahan. jadi tugasnya apabila ada kegiatan itu yang akan kami pikirkan kembali

**PANJA :** Itu kenapa kita petakan apa yang masuk perma dan sop jadi satu kali jalan ada 3 dokumen yang disiapkan dengan tenggat waktu yang cukup singkat

**BEM :** di dasar hukum, mengingat dasar hukum ppo dan gbhk, untuk ppo undip itu yang amandemen kedua tidak dimasukkan masih memakai yang 2017, tidak ada kata amandemen seperti uud 1945

**PANJA:** ok

**BEM :** salah satu asas yaitu asas tidak kaku, itu maksudnya apa?

**PANJA:** sebetulnya berkaitan dengan melihat kebijakan anggaran yang berubah jadi kita buat tidak bisa berdiri sendiri dengan pihak dekanat dan sangat berimplikasi besar dan perlu hal hal yang disesuaikan jadi kalo misal ada yang bertentangan maka kita bakal dilakukan oleh pihak dekanat terkait dengan pengawasan juga dengan nilai paling menguntungkan apabila ada hal hal yang hadir dari pihak eksternal maka ada nilai yang menguntungkan

**BEM :** saran, diubah menjadi **asas fleksibilitas**

**PANJA:** (*belum dijawab*)

**BEM :** tabel tabel ini bakal dimasukin ke perma?





# SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

JL. PROF SOEDARTO, KEC. TEMBALANG, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50275

CONTACT PERSON : LONITA AINI YUMNA (085293497416)

EMAIL : SENATMAHASISWA.FHUNDIP@GMAIL.COM | LINE : @WMV9874F | WEBSITE : SM.FH.UNDIP.AC.ID

**PANJA:** nanti tabel indikator penilaian proker akan dibuatkan di SK agar dapat mengikuti keadaan dinamis yang akan terjadi

**BEM :** apa yang kemudian jadwalkan untuk rdp ini dadakan, jadi belum bisa mengkaji lebih dalam tentang dim ini. Kalau ada aspirasi lanjutan, kami bisa sampaikan dalam forum apalagi?

**PANJA:** ok, mungkin aku ijin menjelaskan ya. RDP hari ini bukanlah RDP terakhir melainkan akan dilakukan RDP dengan Dekanat, seluruh Ormawa jadi dapat memberikan saran atau aspirasi di RDP selanjutnya.

**BEM :**

**PANJA:**

**BEM :**





# SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

JL. PROF SOEDARTO, KEC. TEMBALANG, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50275

CONTACT PERSON : LONITA AINI YUMNA (085293497416)

EMAIL : SENATMAHASISWA.FHUNDIP@GMAIL.COM | LINE : @WMV9874F | WEBSITE : SM.FH.UNDIP.AC.ID

**PANJA:**

**BEM :**

**PANJA:**

